



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

2024 LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Badan dan Wali Kota Batam tahun 2024. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2024 telah mampu membantu Kota Batam sebagai kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi dan membuat Kota Batam bisa dikatakan tidak terlalu bergantung dengan dana transfer oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berkat dukungan sumber daya dan pihak terkait dalam proses pencapaian kinerja. Namun terlepas dari itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu dimaksimalkan lagi guna melampaui target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap capaian atas kinerja yang diperjanjikan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Kami sadar bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

Batam, 18 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
1.5 Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah	5
1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Jabatan	9
Tabel 1.2	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Pangkat dan Golongan	9
Tabel 1.3	Data ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	10
Tabel 1.4	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Unit Kerja...	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.3	Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024	30
Tabel 3.4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024	33
Tabel 3.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2024	39
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024	40
Tabel 3.8	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023-2024	41
Tabel 3.9	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023-2024..	42
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023-2024	42
Tabel 3.11	Jumlah Wajib Pajak Kota Batam	43
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	8
Gambar 3.1	Relaksasi BPHTB	45
Gambar 3.2	Relaksasi PBB-P2	45
Gambar 3.3	Pelayanan PBB-P2 dengan Qris	46
Gambar 3.4	Sosialisasi Pajak Daerah	46
Gambar 3.5	Laporan Pemasangan Tapping Box	47
Gambar 3.6	Roadshow PBB-P2	47
Gambar 3.7	Penindakan Pelanggaran	48
Gambar 3.8	Kerjasama Lintas Instansi	48
Gambar 3.9	Pengembangan Aplikasi SIMREK	49
Gambar 3.10	Pelayanan Online	49
Gambar 3.11	Penegembangan Mitra Layanan	50
Gambar 3.12	Apresiasi Wajib Pajak	50
Gambar 3.13	Pengembangan Kompetensi SDM	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun 2024 memiliki 1 (satu) tujuan yaitu meningkatnya kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah dengan 2 (dua) indikator. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut, indikator “Pertumbuhan pajak daerah” memiliki realisasi sebesar 14,75% dari target 4,72% atau memiliki capaian sebesar 312,59%. Sehingga masuk ke dalam kategori **“Sangat Tinggi”**. Hal ini dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengoptimalisasikan target yang ditetapkan, diantaranya dengan terus melakukan kajian potensi dan pembaruan peraturan terkait dasar hukum pengenaan pajak, melakukan aksi jemput bola terhadap masyarakat yang ingin membayar pajak, memberikan diskon terhadap pokok pajak, memberikan apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak.

Sedangkan untuk indikator kedua yakni “Pertumbuhan retribusi daerah” memiliki realisasi sebesar 20,81% dari target 4,72% atau memiliki capaian sebesar 440,91%. Sehingga masuk ke dalam kategori **“Sangat Tinggi”**. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan kawasan wisata yang semakin baik ditunjang dengan gencarnya promosi melalui sosial media dan kerjasama kemitraan dengan agen perjalanan mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Batam. Selain itu dengan menggeliatnya *event* atau festival lokal membuat roda perekonomian terus berputar dengan lancar, sehingga beberapa jenis retribusi daerah ikut terdampak positif.

Untuk sasaran strategis yakni meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan 2 (dua) indikator yang harus dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target indikator sasaran strategis tersebut, indikator “Persentase meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah terhadap target dan pengkondisian retribusi daerah” memiliki realisasi 98,84%. Sedangkan untuk indikator “Persentase meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target” memiliki realisasi 99,49%. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua indikator sasaran strategis tercapai pada rentang interval >90% s.d ≤100 % dengan kriteria/predikat capaian kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Secara umum, keberhasilan capaian target indikator sasaran ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Perbaikan basis data subjek dan objek pajak daerah;
2. Pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah;
3. Pengembangan kajian potensi pajak daerah;
4. Pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment*;
5. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang pajak daerah;
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan;
7. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
8. Peningkatan kualitas pelayanan (SDM).

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Dari 2 (dua) program tersebut, terdapat 1 (satu) program teknis yang perlu lebih dioptimalkan, dimana Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Daerah mencapai 98.84% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat persen) dari target 100% (seratus persen). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya penurunan jumlah titik reklame dikarenakan pelebaran ruas jalan arteri;
2. Belum meratanya distribusi SPPT PBB-P2 kepada masyarakat;
3. Transaksi restoran yang melalui aplikasi online belum dapat menjadi objek pemungutan pajak;
4. Belum diterapkannya tarif dasar PBJT-Tenaga Listrik yang terbaru di Kota Batam;
5. Masih rendahnya tingkat kunjungan ke tempat hiburan di Kota Batam;
6. Dll.

Sementara Realisasi Retribusi Daerah hanya mencapai 87.89% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen) dari target 100% (seratus persen). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga kurang maksimal dikarenakan minimnya armada yang berstatus layak pakai;
2. Adanya penurunan jumlah penumpang kapal dikarenakan faktor cuaca;
3. Perusahaan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal;
4. Harga daging impor jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging segar lokal sehingga rumah potong hewan sepi peminat;
5. Dll.

Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah yang menjadi indikator kinerja dari kegiatan teknis menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari target pertumbuhan 5%, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berhasil membuat pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 11,84% atau mencapai 236,76%. Hal ini dipengaruhi oleh pengembangan sistem dan peningkatan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya atau usahanya sebagai wajib pajak dan subjek pajak. Selain itu, pencapaian ini juga dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat.

Untuk kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 43.117.624.257 atau 94,27% (sembilan puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari total pagu anggaran sebesar Rp 45.739.938.353. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan sinergitas dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus diimbangi dengan dukungan keuangan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, Badan pendapatan Daerah Kota Batam juga memiliki tanggung jawab mengelola pendapatan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik selaku pemberi mandat.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi atas capaian kinerja yang terukur kepada publik atas target kinerja yang telah diperjanjikan;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk menyusun LKjIP Tahun 2024 guna memperhatikan arah dan garis kebijakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2023 tentang Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 163 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja Tahunan
- 2.3 Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran
- 2.4 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1.5 Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024

tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

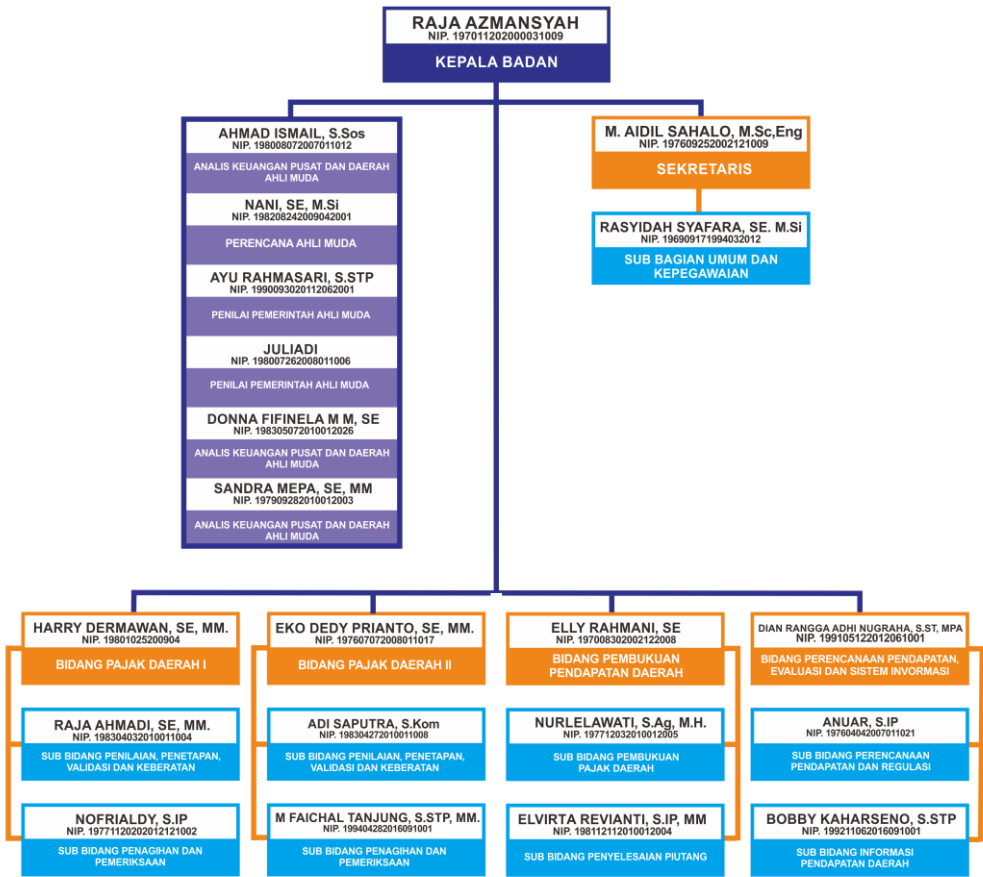
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pendapatan daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Piutang.
6. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1.1
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM



b. Sumber Daya Organisasi

1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 206 (dua ratus enam) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang. Dimana ASN terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 101 (seratus satu) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

TABEL 1.1
DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BERDASARKAN JENIS JABATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NO.	JABATAN	LK	PR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Struktural	11	4	15
2	Jabatan Fungsional	17	18	35
3	Jabatan Pelaksana	48	32	80
TOTAL		76	54	130

TABEL 1.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NO.	PANGKAT - GOL. RUANG	LK	PR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama- IV/e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya - IV/d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda - IV/c	1	0	1
4	Pembina Tingkat I - IV/b	2	1	3
5	Pembina - IV/a	2	4	6

NO.	PANGKAT - GOL. RUANG	LK	PR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Penata Tingkat I - III/d	6	16	22
7	Penata - III/c	17	5	22
8	Penata Muda Tingkat I - III/b	9	8	17
9	Penata Muda - III/a	14	4	18
10	Pengatur Tingkat I - II/d	6	0	6
11	Pengatur - II/c	1	2	3
12	Pengatur Muda Tingkat I - II/b	1	0	1
13	Pengatur Muda - II/a	2	0	2
14	Juru Tingkat I - I/d	0	0	0
15	Juru - I/c	0	0	0
16	Juru Muda Tingkat I - I/b	0	0	0
17	Juru Muda - I/a	0	0	0
TOTAL		61	40	101

TABEL 1.3
DATA ASN DAN NON ASN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Magister (S2)	18	1	19
3	Sarjana (S1)	69	29	98
4	Diploma IV (D4)	6	0	6
5	Diploma III (D3)	7	3	10
6	Diploma II (D2)	0	0	0
7	Diploma I (D1)	0	0	0
8	SMA/SMK	29	43	72
9	SMP	1	0	1
10	SD	0	0	0
TOTAL		130	76	206

TABEL 1.4
DATA ASN DAN NON ASN
BERDASARKAN UNIT KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NO.	BIDANG	ASN	NON ASN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Badan	1	0	1

NO.	BIDANG	ASN	NON ASN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sekretariat	20	8	28
3	Bidang Pajak Daerah I	43	29	72
4	Bidang Pajak Daerah II	29	26	55
5	Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	22	6	28
6	Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi	15	7	22
TOTAL		130	76	206

2. Aplikasi Publik Penunjang Optimalisasi Pajak Daerah

a. E-BPHTB : <https://ebphtb.batam.go.id>

Terintegrasi dengan database PBB dan database BPHTB untuk pencatatan realisasi penerimaan BPHTB (host to host dengan Bank persepsi), terkoneksi dengan Notaris/PPAT dan BPN serta digunakan untuk verifikasi kelengkapan data dan kewajaran pembayaran BPHTB oleh Petugas AR Bapenda

b. E-SPPT PBB-P2 : <https://esppt.batam.go.id>

Terintegrasi dengan database PBB, dibangun untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam informasi kewajiban PBB-P2 terutang serta mencetak SPPT PBB-P2.

c. SIEPENDA : <https://siependa.batam.go.id>

Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Daerah (SIEPENDA) berfungsi memberikan informasi target dan realisasi penerimaan daerah Kota Batam secara *real time* yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

d. E-BILLING : **<https://ebilling.batam.go.id>**

Aplikasi yang terintegrasi dengan bank untuk mendapatkan kode billing pembayaran pajak *self assessment*.

e. E-SPTPD : **<https://esptpd.batam.go.id>**

Membantu wajib pajak dalam melaporkan status pembayaran pajak non PBB-P2 dan BPHTB atau Pajak *self assessment* (hotel, restoran, hiburan, parkir, PPJ, dan MBLB).

f. SIMREK : **<https://simrek-batam.id>**

Membantu pengecekan jumlah titik reklame, tanggal bayar, jatuh tempo, pemilik, dan lokasi reklame.

1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

a. Isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dengan konsentrasi sebagai pelaksana teknis pemungutan pajak daerah dan koordinator pemungutan retribusi daerah. Dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai peranan untuk penyusunan kebijakan dan pendistribusian informasi, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan, serta mengawal dan mengevaluasi capaian pendapatan terhadap target.

Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi permasalahan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital;
4. Peningkatan kompetensi Aparatur.

b. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Perlunya penyempurnaan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Distribusi informasi mengenai regulasi terbaru kepada *stakeholder* perlu lebih ditingkatkan;

3. Perlunya peningkatan penerapan sanksi secara tegas terhadap pelaku pelanggaran peraturan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah;
4. Perlunya meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak;
5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah perlu ditingkatkan;
6. Pengembangan teknologi digital guna mempermudah pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk dioptimalkan;
7. Peningkatan kompetensi aparatur antar lini jabatan perlu lebih digiatkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara terstruktur guna melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karena itu Rencana Strategis merupakan sebuah wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf dalam mendesain dan menentukan masa depan organisasi mereka.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”.

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal

yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*";

- b. "Madani" bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang religius;
- c. "Sejahtera" mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada;
- d. "Modern" mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Untuk mencapai visi di atas, Pemerintah Kota Batam menetapkan beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berpedoman pada visi dan misi di atas, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah memastikan penerimaan pendapatan daerah sebagai motor penggerak pembangunan Kota Batam melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun rencana strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam mencapai visi dan misi, maka ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah		Pertumbuhan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah)				
		1. Pertumbuhan Pajak Daerah	25,12%	36,47%	4.72%	4.72%
		2. Pertumbuhan Retribusi Daerah	38,09%	44,44%	4.72%	4.72%
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera		
Misi 5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah; 2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah; 4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data WP PBB; 5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrumen SAKIP. RKT sendiri menjadi dokumen penjabaran dari RPJMD dan Renstra, dimana dokumen RKT disusun untuk menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masuk ke dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan yang mana terdiri dari 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Perencanaan sebagaimana disebut di atas tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.3
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%	100	38.648.072.053
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100	31.894.306.374
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	131	31.894.306.374
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	%	100	138.670.415
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	26.690.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	56	111.980.415
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.307.901.396
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.905.000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	634.986.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	145.049.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.010.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.200.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	487.751.396

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SKPD				
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	63.461.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	18	63.461.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.329.282.868
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	594.900.000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	210.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.524.382.868
5.0201.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	914.450.000
5.0201.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya`	Unit	24	595.980.000
5.0201.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	294	316.970.000
5.0201.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.500.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	Rupiah	1.423.589.9447.986	7.091.866.300
		2. Realisasi Retribusi Daerah	Rupiah	193.131.375.383	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	%	5	7.091.866.300
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	527.166.300

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	2.425.526.000
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	400	1.300.000.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	986.822.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	30	1.171.750.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	295	84.000.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	153.655.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	8.000	183.280.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	259.667.000
TOTAL ANGGARAN					45.739.938.353

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang sesuai dengan target kinerja, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu untuk membuat Perjanjian Kinerja. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100%
		2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan sebagai visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun rumus pengukuran kinerja yang dipakai Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai makna semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu sebaliknya apabila semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja.

Capaian kinerja yang telah dihitung kemudian perlu diinterpretasikan dengan menggunakan skala nilai dan kriteria agar memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Skala nilai dan kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	>90% s.d ≤100%	Sangat tinggi
2	>75% s.d ≤90%	Tinggi
3	>65% s.d ≤75%	Sedang
4	>50% s.d ≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber data yang digunakannya.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun Berkenaan

Untuk dapat melihat dan menganalisis capaian dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu untuk disusunnya formula perhitungan. Formula perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PENGUKURAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah		Pertumbuhan Pajak Daerah	$\text{Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi PD tahun (n)} - \text{Realisasi PD tahun (n - 1)}}{\text{Realisasi PD tahun (n - 1)}} \times 100$	4,72%	14,75%	312,59%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi APBD (LRA)
		Pertumbuhan Retribusi Daerah	$\text{Pertumbuhan Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi RD tahun (n)} - \text{Realisasi RD tahun (n - 1)}}{\text{Realisasi RD tahun (n - 1)}} \times 100$	4,72%	20,81%	440,91%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi APBD (LRA)
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	$\text{Meningkatnya Realisasi PD terhadap Target} = \frac{\text{Realisasi PD tahun (n)}}{\text{Target PD tahun (n)}} \times 100$	100%	98,84%	98,84%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi APBD (LRA)
		Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	$\text{Meningkatnya Realisasi PAD terhadap Target} = \frac{\text{Realisasi PAD tahun (n)}}{\text{Target PAD tahun (n)}} \times 100$	100%	99,49%	99,49%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi APBD (LRA)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja Pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 14,75% dari target 4,72% atau tingkat capaian sebesar 312,59% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini turut dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengoptimalkan target yang ditetapkan, diantaranya dengan terus melakukan kajian potensi dan pembaruan peraturan terkait dasar hukum pengenaan pajak, melakukan aksi jemput bola terhadap masyarakat yang ingin membayar pajak, memberikan diskon terhadap pokok pajak, memberikan apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak.

Sedangkan untuk Pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 20,81% dari target 4,72% atau tingkat capaian sebesar 440,91% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini turut dipengaruhi oleh pengelolaan kawasan wisata yang semakin baik ditunjang dengan gencarnya promosi melalui sosial media dan kerjasama kemitraan dengan agen perjalanan mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Batam. Selain itu dengan menggeliatnya *event* atau festival lokal membuat roda perekonomian terus berputar dengan lancar, sehingga beberapa jenis retribusi daerah ikut terdampak positif.

Capaian indikator kinerja Persentase Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah sebesar 98,84% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan “sangat tinggi” sementara untuk indikator kinerja Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target sebesar 99,49% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan “sangat tinggi”.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap

Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah serta Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target yang berkategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari dilaksanakannya:

1. Perbaikan basis data subjek dan objek pajak daerah;
2. Pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah;
3. Pengembangan kajian potensi pajak daerah;
4. Pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment*;
5. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang pajak daerah;
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan;
7. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
8. Peningkatan kualitas pelayanan (SDM).

TABEL 3.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Realisasi Pajak Daerah	1.423.589.9447.986	1.407.042.992.643,15	98,84%	Sangat Tinggi
		Realisasi Retribusi Daerah	193.131.375.383	169.737.328.905,50	87,89%	Tinggi
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	5%	11,84%	236,76%	Sangat Tinggi

Realisasi Pajak Daerah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dimana realisasi yang Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bisa capai di angka Rp 1.407.042.992.643,15 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.423.589.9447.986 atau mencapai 98,84% sehingga memiliki kategori kinerja “sangat tinggi”. Meskipun demikian, hasil tersebut tetap saja tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga perlu lebih dioptimalkan lagi. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya:

1. Adanya penurunan jumlah titik reklame dikarenakan pelebaran ruas jalan arteri;
2. Belum meratanya distribusi SPPT PBB-P2 kepada masyarakat;
3. Transaksi restoran yang melalui aplikasi online belum dapat menjadi objek pemungutan pajak;
4. Masih rendahnya tingkat kunjungan ke tempat hiburan di Kota Batam;
5. Dll.

Hal serupa terjadi pada indikator kinerja program yang kedua, yakni Realisasi Retribusi Daerah. Dimana realisasi retribusi daerah memiliki kategori kinerja tinggi, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 193.131.375.383 namun hanya bisa tercapai di angka Rp 169.737.328.905,50 atau tercapai 87,89%. Hasil ini dipengaruhi oleh:

1. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga kurang maksimal dikarenakan minimnya armada yang berstatus layak pakai;
2. Adanya penurunan jumlah penumpang kapal dikarenakan faktor cuaca;
3. Perusahaan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal;

4. Harga daging impor jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging segar lokal sehingga rumah potong hewan sepi peminat;
5. Dll.

Sedangkan Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah yang menjadi indikator kinerja dari kegiatan teknis menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari target pertumbuhan 5%, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berhasil membuat pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 11,84% atau mencapai 236,76%. Hal ini dipengaruhi oleh pengembangan sistem dan peningkatan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya atau usahanya sebagai wajib pajak dan subjek pajak. Selain itu, pencapaian ini juga dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat.

TABEL 3.4
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pajak Reklame	23.069.947.986,00	22.021.756.526,00	95,46 %
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	4.320.000.000,00	2.972.843.334,00	68,82 %
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	265.000.000.000,00	210.667.534.495,00	79,50 %
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	424.007.291.715,00	492.145.582.171,15	116,07 %
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	161.900.000.000,00	151.057.054.556,00	93,30 %
6	PBJT-Tenaga Listrik	322.500.000.000,00	310.822.499.262,00	96,38 %
7	PBJT-Jasa Perhotelan	157.500.000.000,00	159.985.270.298,00	101,58 %
8	PBJT-Jasa Parkir	16.200.000.000,00	10.625.865.338,00	65,59 %
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	49.092.708.285,00	46.744.586.663,00	95,22 %
JUMLAH		1.423.589.947.986,00	1.407.042.992.643,15	98,84 %

Dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, ternyata hanya ada 2 (dua) yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT-Jasa Perhotelan. Untuk itu perlu dianalisis permasalahannya.

a) Pajak reklame

Tidak tercapainya target pajak reklame ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah titik reklame akibat pelebaran ruas jalan arteri.

b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Tidak tercapainya dikarenakan penerimaan jenis pajak ini sangat tergantung pada aktivitas cut and fill.

c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tidak tercapainya target pendapatan jenis pajak ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan membayar pajak dari masyarakat dan belum merata distribusi SPPT PBB kepada Wajib Pajak.

d) PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Tidak tercapainya dikarenakan transaksi online melalui Aplikasi yang belum dapat menjadi objek pemungutan pajak, walaupun tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran sudah signifikan.

e) PBJT-Tenaga Listrik

Tidak tercapainya dikarenakan pertumbuhan pelanggan dari Non PLN belum maksimal karena PLN Batam masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan.

f) PBJT-Jasa Parkir

Masih rendahnya jumlah kunjungan ke mall ataupun tempat pusat perbelanjaan.

g) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Tidak tercapainya dikarenakan masih rendahnya tingkat kunjungan ke tempat hiburan di Kota Batam.

TABEL 3.5
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2024

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
Retribusi Jasa Umum		79.143.149.761,00	63.363.051.578,00	80,06
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.937.889.761,00	12.850.465.812,00	99,32
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	47.855.260.000,00	38.600.611.731,00	80,66
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.000.000.000,00	11.218.361.227,00	62,32
4	Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	224.365.750,00	64,10
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	38.565.550,00	0,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	430.681.508,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha		14.767.825.622,00	9.958.228.194,00	67,43
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000,00	313.414.522,00	52,24
8	Retribusi Pelayanan Rumah Potonghewan Ternak	73.446.300,00	42.261.000,00	57,54
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	27.879.322,00	187.900.000,00	673,98
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	14.066.500.000,00	9.414.652.672,00	66,93
Retribusi Perizinan Tertentu		99.220.400.000,00	96.416.049.133,50	97,17
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	53.500.000.000,00	56.513.956.972,00	105,63
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	45.720.400.000,00	39.902.092.161,50	87,27
JUMLAH		193.131.375.383,00	169.737.328.905,50	87,89

Dari 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang diemban oleh masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) penghasil, terdapat 2 (dua) jenis retribusi daerah yang melampaui target yang ditetapkan, yakni Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Sementara itu ada 2 (dua) jenis retribusi daerah yang tidak menjadi target pemasukan, namun justru menyumbang pemasukan bagi PAD Kota Batam, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun untuk jenis retribusi daerah yang belum mencapai target yang telah disepakati, perlu mendapat perhatian dengan melakukan analisis penyebabnya.

a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Tidak tercapainya target dikarenakan pelayanan pengangkutan sampah kurang maksimal dikarenakan minimnya armada pengangkut sampah yang berkondisi layak pakai.

b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tidak tercapainya target dikarenakan pembelian stiker berlangganan parkir tepi jalan umum hanya mencapai 4%.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Tidak tercapainya target dikarenakan terjadinya persaingan terbuka dengan pasar milik swasta yang berjarak relatif dekat dan lebih modern. Selain itu jumlah pedagang yang menempati kios/lapak tidak sebanyak yang ditargetkan.

d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tidak tercapainya target dikarenakan

e) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Tidak tercapainya target dikarenakan kebutuhan dan permintaan masyarakat akan karkas sapi segar masih rendah, rata-rata pemotongan sapi di RPH hanya 1 sampai 2

ekor per hari. Selain itu ditunjang dengan harga daging sapi impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga daging sapi lokal.

f) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tidak tercapainya target dikarenakan perusahaan kini lebih mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal dibandingkan dengan tenaga kerja asing.

2. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun (n) dengan tahun (n-1). Pengukuran dengan metode ini dipandang perlu guna melihat apakah kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah efektif dan efisien dengan menunjukkan peningkatan atau kinerja yang dilakukan perlu untuk dilakukan evaluasi sehingga bisa berdampak positif terhadap target capaian kinerja.

TABEL 3.6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN
TAHUN 2023-2024

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	2023			2024		
			TARGET (4)	REALISASI (5)	CAPAIAN (6)	TARGET (7)	REALISASI (8)	CAPAIAN (9)
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah		Pertumbuhan Pajak Daerah	4,72 %	18,58 %	393,73 %	4,72 %	14,75%	312,59 %
		Pertumbuhan Retribusi Daerah	4,72 %	48,42 %	1025,95 %	4,72 %	20,81 %	440,91 %
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100 %	90,72 %	90,72 %	100 %	98,84 %	98,84 %
		Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100 %	88,63 %	88,63 %	100 %	99,49 %	99,49 %

TABEL 3.7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2023-2024

PROGRAM (1)	KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	2023			2024		
			TARGET (4)	REALISASI (5)	CAPAIAN (6)	TARGET (7)	REALISASI (8)	CAPAIAN (9)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Realisasi Pajak Daerah	1.368.618.493.496,00	1.226.137.604.182,90	89,59%	1.423.589.9447.986	1.407.042.992.643,15	98,84%
		Realisasi Retribusi Daerah	196.684.073.481,00	140.498.218.797,00	71,43%	193.131.375.383	169.737.328.905,50	87,89%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	5%	8,88%	177,6%	5%	11,84%	236,76%

TABEL 3.8
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2023-2024

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Pajak Reklame	19.813.768.911,00	22.021.756.526,00	2.207.987.615,00	11,14
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.992.267.950,35	2.972.843.334,00	980.575.383,65	49,22
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	214.532.617.777,00	210.667.534.495,00	- 3.865.083.282,00	-1,80
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	414.286.200.730,00	492.145.582.171,15	77.859.381.441,15	18,79
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	128.553.606.790,00	151.057.054.556,00	22.503.447.766,00	17,51
6	PBJT-Tenaga Listrik	275.282.708.069,00	310.822.499.262,00	35.539.791.193,00	12,91
7	PBJT-Jasa Perhotelan	126.891.585.437,90	159.985.270.298,00	33.093.684.860,10	26,08
8	PBJT-Jasa Parkir	11.015.771.754,00	10.625.865.338,00	- 389.906.416,00	-3,54
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	33.769.076.763,65	46.744.586.663,00	12.975.509.899,35	38,42
JUMLAH		1.226.137.604.182,90	1.407.042.992.643,15	180.905.388.460,25	14,75

TABEL 3.9
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2023-2024

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Jasa Umum	57.369.104.190,00	63.363.051.578,00	5.993.947.388,00	10,45
2	Jasa Usaha	774.831.181,00	9.958.228.194,00	9.183.397.013,00	1185,21
3	Perizinan Tertentu	82.354.283.426,00	96.416.049.133,50	14.061.765.707,50	17,07
JUMLAH		140.498.218.797,00	169.737.328.905,50	29.239.110.108,50	20,81

TABEL 3.10
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023-2024

NO	JENIS PAD	REALISASI 2023	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Hasil Pajak Daerah	1.226.137.604.182,90	1.407.042.992.643,15	180.905.388.460,25	14,75
2	Hasil Retribusi daerah	140.498.218.797,00	169.737.328.905,50	29.239.110.108,50	20,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	10.205.472.833,00	7.937.122.231,00	- 2.268.350.602,00	-22,23
4	Lain-lain PAD yang Sah	152.178.763.609,89	183.900.101.515,54	31.721.337.905,65	20,84
JUMLAH		1.529.020.059.422,79	1.768.617.545.295,19	239.597.485.872,40	15,67

TABEL 3.11
JUMLAH WAJIB PAJAK KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO.	JENIS PAJAK	JUMLAH WP/OP		% PERTUMBUHAN
		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((4-3)/3)*100
1	Pajak Reklame	6.875	7.477	8,76
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	31	23	-25,81
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	281.864	315.811	12,04
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.347	20.259	10,42
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.374	1.460	6,26
6	PBJT-Tenaga Listrik	125	112	-10,40
7	PBJT-Jasa Perhotelan	243	240	-1,23
8	PBJT-Jasa Parkir	34	37	8,82
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	260	332	27,69
TOTAL		309.153	345.751	11,84

Melihat hasil capaian kinerja di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam selaku *leading sector* dari pemungutan PAD perlu melakukan pengembangan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama pada capaian realisasi Retribusi Daerah. Hal ini perlu diupayakan bersama dengan OPD Penghasil lainnya agar penerimaan daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menyikapi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bersama OPD Penghasil lainnya melakukan beberapa kebijakan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

1. Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah

- a. Melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024, pemberian relaksasi BPHTB sebesar 50% terhadap wajib pajak penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis pada program PTSL dan/atau PRODA dengan luas maksimal 600 m² serta bebas BPHTB 100% untuk wajib pajak penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis pada program PTSL di kawasan kampung tua;

Gambar 3.1
Relaksasi BPHTB



- b. Perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok, penghapusan sanksi administrasi dan/atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 4 Tahun 2024;

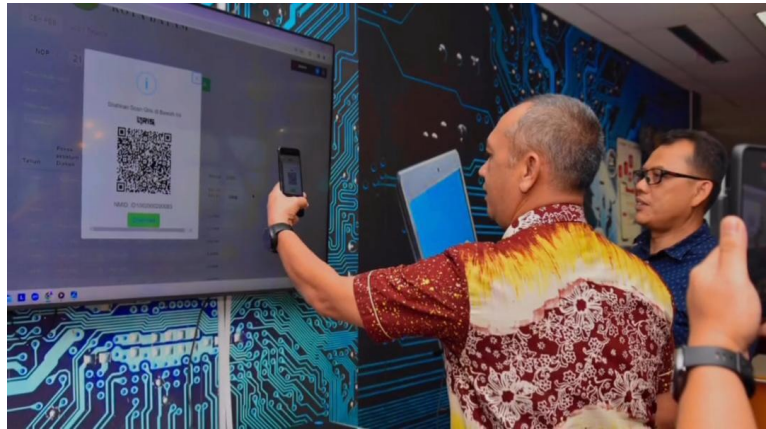
Gambar 3.2
Relaksasi PBB-P2



- c. Pengembangan metode PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dengan menggunakan sistem Qris;

Gambar 3.3

Pembayaran PBB-P2 dengan Qris



- d. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar tercipta kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bekerjasama dengan instansi terkait.

Gambar 3.4

Sosialisasi Pajak Daerah



**PENINGKATAN LITERATUR
MASYARAKAT TAHUN 2024**

- 11 Januari 2024, Planet Holiday Hotel Batam – Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 25 Januari 2024, AP Premier Hotel Batam – Sosialisasi Optimalisasi Pajak Daerah melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2024
- 21 Februari 2024, AP Premier Hotel Batam – Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 04-05 Maret, Crown Vista Hotel Batam – Acara Pertemuan Stakeholder terkait Implementasi Perda 1/2024 tentang PDRD terhadap BPHTB dan PBB-P2
- 07 Maret 2024, Harris Hotel Batam Center – Sosialisasi Layanan Retribusi pada Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- e. Implementasi pemasangan alat rekam pajak (Tapping Box) APBD 2024;

Gambar 3.5

Laporan Pemasangan Tapping Box



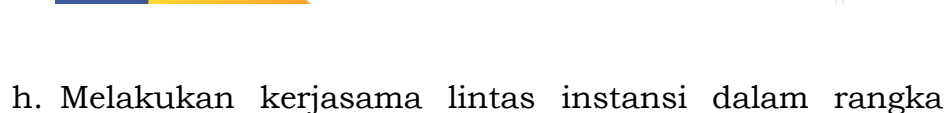
- f. Melakukan Roadshow (Jemput Bola) Pelayanan PBB di 12 (dua belas) Kecamatan, Komplek Perumahan dan Pusat Perbelanjaan;

Gambar 3.6

Roadshow PBB P-2



Gambar 3.7
Penindakan Pelanggaran



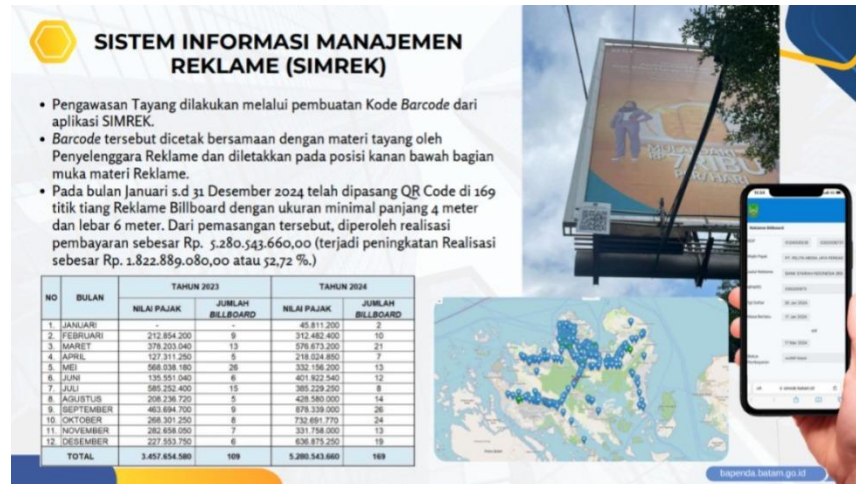
Gambar 3.8
Kerjasama Lintas Instansi



- i. Pengembangan Sistem Manajemen Reklame (SIMREK);

Gambar 3.9

Pengembangan Aplikasi SIMREK



- j. Penagihan secara aktif terhadap Piutang Pajak Daerah;
- k. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pendaftaran sampai pelaporan pajak daerah secara online;

Gambar 3.10

Pelayanan Online



1. Pengembangan mitra layanan pembayaran Pajak Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah bank seperti Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB, Bank Mandiri, dll;

Gambar 3.11
Pengembangan Mitra Layanan



m. Apresiasi terhadap Wajib Pajak taat pajak;

Gambar 3.12
Apresiasi Wajib Pajak



n. Pengembangan kompetensi SDM melalui Diklat.

Gambar 3.13

Pengembangan Kompetensi SDM



2. Kebijakan Optimalisasi Retribusi Daerah

- a. Melakukan penyusunan regulasi terbaru atas hasil evaluasi tarif retribusi yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini;
- b. Pengadaan peralatan mesin atau kendaraan operasional oleh OPD Penghasil guna memberikan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan terbaru;
- d. Penambahan lokasi titik parkir dengan pembayaran non tunai dan mengevaluasi titik parkir yang tidak potensial;
- e. Membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini OPD Penghasil tentang tugas dan tanggung jawab selaku pengelola retribusi daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 43.117.624.257 yang bersumber dari DAU dan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.12
REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	38.648.072.053	100	37.760.974.770	100	97,70
I.I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	31.894.306.374	100	31.511.952.504	100	98,80
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/Bulan	31.894.306.374	130 Orang/Bulan	31.511.952.504	100	98,80
I.II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	138.670.415	100	117.602.748	100	84,81
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.690.000	1 Paket	25.500.000	100	95,54
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	111.980.415	56 Orang	92.102.748	90,63	82,25
I.III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100	1.307.901.396	100	1.084.121.998	100	82,89

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.905.000	1 Paket	15.266.600	100	95,99
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	634.986.000	9 Paket	571.381.000	100	89,98
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	145.049.000	3 Paket	127.618.000	100	87,98
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.010.000	1 Paket	16.500.000	100	97,00
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	4.800.000	100	66,67
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.751.396	12 Laporan	348.556.398	100	71,46
I.IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100	63.461.000	100	58.830.000	100	92,70
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	63.461.000	18 Unit	58.830.000	100	92,70
I.V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	4.329.282.868	100	4.161.726.980	100	96,13

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pemerintah Daerah yang Terpenuhi						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	594.900.000	5 Laporan	579.816.100	100	97,46
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	12 Laporan	186.000.000	100	88,57
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.524.382.868	12 Laporan	3.395.910.880	100	96,35
I.VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100	914.450.000	100	826.740.540	100	90,41
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	595.980.000	24 Unit	558.642.540	100	93,74
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	316.970.000	292 Unit	266.658.000	100	84,13
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1.500.000	1 Unit	1.440.000	100	96,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Dipelihara/Direhabilitasi						
II	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	1.423.589.947.986	7.091.866.300	1.407.042.992.643,15	5.356.649.487	98,84	75,53
		2. Realisasi Retribusi Daerah	193.131.375.383		169.737.328.905,50		87,89	
II.I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5%	7.091.866.300	11,84%	5.356.649.487	236,76	75,53
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	527.166.300	3 Dokumen	477.649.067	100	90,61
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	2.425.526.000	5 Laporan	1.504.593.420	100	62,03
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	1.300.000.000	276 Unit	657.744.500	99,00	50,60
4.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	986.822.000	12 Laporan	928.167.000	100	94,06
5.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	1.171.750.000	30 Laporan	1.147.300.000	100	97,91
6.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	84.000.000	298 Layanan	80.400.000	100	95,71
7.	Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan	12 Dokumen	153.655.000	12 Dokumen	140.014.000	100	91,12

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN	OUTPUT	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Data Pelaporan Pajak Daerah	Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi						
8.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8000 Dokumen	183.280.000	8000 Dokumen	176.712.000	100	96,42
9.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	259.667.000	12 Dokumen	244.069.500	100	93,99
TOTAL				45.739.938.353		43.117.624.257		94,27

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun guna memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024. Dari pengukuran Indikator Sasaran Strategis pada Persentase Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dengan realisasi sebesar 98,84%, sedangkan pada indikator Sasaran Strategis yang kedua pada Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target dengan realisasi sebesar 99,49%.

Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Retribusi Daerah menunjukkan tingkat capaian yang sangat tinggi. Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,72% namun realisasinya menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,75%. Pertumbuhan Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar 4,72%, namun realisasinya sebesar 20,81%. Untuk Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah dilihat melampaui target. Pertumbuhan Wajib

Pajak Daerah ditargetkan sebesar 5%, namun realisasinya mencapai angka sebesar 11,84%.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2024 ini dijadikan sebagai *feedback* (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Dengan terus menggali potensi pajak yang belum terdata sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat bermanfaat baik untuk eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat/publik, maupun untuk pihak internal sebagai evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan maupun tugas serta fungsi seluruh elemen yang ada di Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan target kinerja dapat tercapai dengan baik.

4.2. Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan penyusunan LKjIP ini yang kiranya perlu mendapat perhatian bersama agar dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun-tahun berikutnya, antara lain;

1. Perlu peningkatan komitmen bersama dalam membangun SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
2. Keterbukaan dan pengumpulan data yang akurat dalam memberikan data dan informasi perlu dilakukan untuk

mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LkjIP.